

# **DIPLOMASI KEBUDAYAAN INDONESIA: ERA ORDE BARU HINGGA KINI**

Rizki Dian Nursita

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: rdiannursita@gmail.com

Ahmad Sahide

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ahmadsahideumy@gmail.com

**Abstract:** Discussion and focus in the study of International Relations have been developed and influenced by the concept of diplomacy. One of the impacts of its development is the emergence of the cultural diplomacy. Cultural diplomacy has long been practiced by Indonesian government, since Indonesia gained its independence. Although the cultural diplomacy in the Old Order era had not shown any significant impact on Indonesia's national interests, cultural diplomacy always be a part of Indonesia's foreign policy. This paper aims to provide an overview, comparison and evaluation of cultural diplomacy in Indonesia from the New Order era until post-reform. Through the analysis of a number of literatures, authors found that Indonesia cultural diplomacy in the New Order era carried to short-term interests; whether economic or development interest manifested in exhibitions, cooperations and international forums, as well as competitions; and still lack of political or cultural interest. However, Indonesia post-reform cultural diplomacy has encouraged the involvement of non-state actors as well as the performance of public and digital diplomacy.

**Keywords:** cultural diplomacy; old order; new order; reformation

## **Pendahuluan**

Perkembangan dalam Hubungan Internasional telah menjadikan studi dalam Hubungan Internasional menjadi beragam. Hubungan Internasional, pada awal perkembangannya, yang selalu identik dengan fenomena perang

dan perdamaian (*war and peace*) kini semakin bergeser, atau bahkan meluas dengan kehadiran sejumlah isu, serta *means* baru yang menjadi instrumen dalam pergumulan negara-negara di dunia.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, kajian HI mulai merambah ke persoalan yang menyangkut kerja sama ekonomi antarnegara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*), upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan seterusnya.<sup>2</sup>

Perkembangan dalam dunia HI itulah sehingga lahirlah diplomasi melalui budaya yang kemudian oleh Joseph Nye disebut sebagai sebuah *soft power*. Meskipun sering diabaikan, diplomasi kebudayaan dapat memainkan peran penting dalam mencapai usaha keamanan dan kemapanan nasional. Diplomasi kebudayaan yang mencakup pertukaran gagasan, seni, dan aspek budaya lainnya dapat mendorong negara-negara untuk saling memahami, dan menghadirkan *mutual interest* yang kemudian meningkatkan *intimacy* atau kedekatan untuk hubungan yang lebih luas, yaitu dalam bidang ekonomi dan politik. Diplomasi kebudayaan adalah cara atau jalan yang dapat ditempuh untuk mendistribusikan kebudayaan suatu negara dalam mendukung politik luar negeri atau diplomasinya yang bertujuan memengaruhi kelompok orang di luar negeri secara positif.<sup>3</sup>

Saat ini, diplomasi kebudayaan menjadi komponen penting dari diplomasi publik dan juga bisa meningkatkan ikatan diplomatik suatu negara dengan cepat.<sup>4</sup> Dalam era kemajuan teknologi dan internet dewasa ini, komunikasi dengan publik secara luas di luar negeri (*foreign public*) berkembang dengan sangat cepat melalui media social seperti *twitter-diplomacy*, *Facebook-diplomacy*, dan juga melalui *YouTube-diplomacy*.<sup>5</sup> Ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman telah membuka ruang yang cukup lebar untuk diplomasi kebudayaan.

Di Indonesia, diplomasi kebudayaan sejatinya telah dipraktikan semenjak pascakemerdekaan, yaitu pada era Orde Lama, baik dalam bidang kesenian, pariwisata, dan olahraga. Diplomasi kebudayaan paska kemerdekaan seringkali terkait dengan kepentingan politik dan ideologis untuk menyatukan negara-negara pascakolonialisme. Hal tersebut diwujudkan dengan membangun sejumlah *landmark* nasional, merubah istana negara sekaligus sebagai pameran bagi sejumlah karya seni, membangun Istana Tampak Siring dan Pendapa Agung di Bali, Panggung Teater Sendratari Ramayana di Prambanan, dan Gedung Wayang Orang di Taman Sriwedari Solo.<sup>6</sup>

Soekarno mengajak negara-negara berkembang yang juga merupakan anggota *non-aligned movement* dalam Konferensi Bandung, atau yang lebih

dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Soekarno juga menginisiasi berdirinya GANEFO atau *Games of New Emerging Forces* yang diikuti oleh 51 negara berkembang. GANEFO yang diadakan pada tahun 1963 di Jakarta yang dicanangkan akan menjadi tandingan bagi Asian Games, setelah kritikan atas penolakan Indonesia terhadap Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1962.<sup>7</sup>

Namun, minat terhadap budaya Indonesia belum menunjukkan dampak yang signifikan sehingga budaya tersebut menjadi konsumsi dan diadopsi oleh masyarakat internasional. Walaupun demikian, diplomasi melalui kebudayaan terus dipraktikkan dan menjadi nilai jual bagi Indonesia hingga saat ini. Maka dari itu, tulisan ini berupaya untuk menggambarkan implementasi diplomasi kebudayaan di Indonesia pada era Orde Baru hingga pascareformasi, serta evaluasi terhadap diplomasi kebudayaan Indonesia secara garis besar.

### **Sekilas mengenai Konsep Diplomasi Kebudayaan**

Sebelum sampai kepada pembahasan mengenai diplomasi kebudayaan di Indonesia, sangat penting untuk menguraikan pengertian konsep diplomasi, kebudayaan, dan diplomasi kebudayaan. Diskusi dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dari fenomena diplomasi. Cakupan pembahasan dalam Hubungan Internasional yang didominasi oleh diskusi mengenai *peace and war*, sehingga membatasi pengertian diplomasi sebagai manajemen Hubungan Internasional melalui negosiasi; mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa dengan cara damai. Dalam pengertian yang lebih umum, diplomasi menurut Holsti juga dapat diartikan sebagai usaha negara dalam memenuhi kepentingan nasional, atau sederhananya diplomasi tidak hanya sekadar perundingan atau negosiasi, namun diplomasi adalah bagian dari politik luar negeri.<sup>8</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dingin, bentuk diplomasi semakin beragam dengan lahirnya sejumlah konsep baru dalam diplomasi, seperti *summit diplomacy* atau diplomasi melalui pertemuan yang melibatkan kepala negara untuk membahas mengenai permasalahan tertentu, maupun *developmental diplomacy* atau proses dimana negara-negara di dunia ketiga, mencoba untuk meningkatkan posisinya dalam kancah internasional dengan terlibat dalam sejumlah forum dan negosiasi dengan negara-negara maju.<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai identitas dan budaya pun semakin meningkat. Globalisasi justru memberikan peluang bagi multikulturalisme, serta tantangan baru terhadap budaya Barat. Budaya dan ideologi menurut Joseph Nye juga dapat dijadikan *soft power* dalam sebuah politik luar negeri yang sama

pentingnya dengan pengaplikasian *hard power*. Budaya dapat diartikan sebagai identitas dari sejumlah individu di masyarakat, yang terdiri dari norma; termasuk agama, serta kekhususan atau gaya yang menampilkan kehidupan sosial.<sup>10</sup> Budaya juga dapat diartikan sebagai buah dari karya manusia yang dapat dipelajari, yang meliputi sistem gagasan (*mentifact or psychofact*), tindakan (*sociofact*), dan hasil karya yang berbentuk fisik atau (*artefact*). Dengan kata lain, sejatinya seluruh gagasan dalam bidang sosial, ekonomi, bahkan politik merupakan bagian dari budaya, karena tiga bidang tersebut meliputi ketiga aspek sistem gagasan, tindakan, dan karya, serta dapat dipelajari.

Diplomasi yang telah dipraktikkan selama berabad-abad mengalami sejumlah perubahan baik dalam karakteristik, aktor, serta bentuknya yang beragam. Diplomasi yang pada era klasik selalu identik dengan hubungan antar utusan negara atau kerajaan yang dilakukan secara tertutup, kini melibatkan aktor-aktor *sub-state* atau bahkan *non-state* dan akses informasi mengenai praktik diplomasi lebih terbuka dan transparan. Tidak hanya itu, isu yang dimasukkan sebagai agenda diplomasi semakin beragam. Dengan kata lain, diplomasi sejatinya juga dapat dikatakan sebagai sebuah “budaya”.

Diplomasi kebudayaan yang akan dibahas di sini bukanlah diplomasi yang semata dilihat sebagai sebuah budaya. Namun aplikasi diplomasi dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, olah raga, dan sejumlah isu lainnya yang kemudian dikategorikan sebagai *low politic*. Sehingga diplomasi kebudayaan kemudian dapat diartikan sebagai diplomasi secara makro; propaganda, maupun mikro; kesenian, pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.<sup>11</sup>

### **Diplomasi Kebudayaan Indonesia: Era Orde Baru Hingga Reformasi**

Pada era Orde Baru Soeharto politik luar negeri Indonesia lebih banyak berfokus kepada sejumlah agenda yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional seperti pembangunan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas politik dalam negeri, di mana hal tersebut dibangun dengan sistem kepemimpinan yang otoriter. Pada era Orde Baru, konsep diplomasi kebudayaan, baik kebudayaan sebagai *means* maupun *goal* memang belum dikenal dibandingkan dengan kerja sama ekonomi dan FDI atau *Foreign Direct Investment*. Walaupun demikian, terdapat sejumlah manifestasi diplomasi kebudayaan dalam agenda politik luar negeri Indonesia.

Kusuma Atmaja, Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode 1978 hingga 1988, telah menginisiasi gagasan diplomasi kebudayaan pada tahun 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan didirikannya Yayasan Nusantara

Jaya pada tahun 1984. Yayasan ini telah berperan dalam praktek diplomasi kebudayaan dalam bidang kesenian melalui eksibisi, yaitu Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat, atau yang kemudian disingkat menjadi KIAS. Program ini meliputi Pameran seni klasik Indonesia yang berjudul *The Sculpture of Indonesia* yang menampilkan 118 benda seni klasik dari Jawa dan Bali, pameran seni tradisional Indonesia yang berjudul *Beyond The Java Sea: Art of The Indonesia's Outer Island*, pameran seni keraton yang berjudul *Court Art of Indonesia* yang menampilkan kehidupan kraton, serta ratusan benda-benda seni, serta pameran seni kehidupan rakyat yang berjudul *Folklife Exhibition*. Pemerintah Indonesia bersama Badan Pengembangan Ekspor Nasional dan Departemen Perdagangan juga mendirikan *Tourism Trade Investment* dan Kadin KIAS dalam rangka mempromosikan ekspor sumber daya Indonesia di bidang non-migas dan pariwisata.<sup>12</sup>

Program ini banyak meniru dari keberhasilan India dalam meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat melalui diplomasi kebudayaan. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat, mengharuskan Indonesia untuk dikenal dunia.<sup>13</sup> Program ini tidak hanya meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, namun juga perhatian organisasi global seperti UNESCO terhadap kebudayaan Indonesia. Menurut Keohane, semakin sering sebuah negara terlibat dalam forum internasional, maka *mutual trust* akan semakin terbentuk, sehingga kemungkinan terjadinya kerja sama semakin meningkat. KIAS boleh jadi tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia saja. Karena intensitas interaksi antar negara dapat berdampak positif terhadap *mutual interest*, dan kerja sama. Sehingga diplomasi kebudayaan juga dapat menjadi pintu bagi sejumlah kerja sama ekonomi dan politik.

Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu perwujudan dari agenda pembangunan Soeharto. Tidak hanya memberi kemanfaatan secara ekonomis, TMII juga dapat dijadikan sarana diplomasi kebudayaan. Pada KTT Non Blok pada tahun 1992 di Jakarta, sejumlah pemimpin negara melakukan aksi penanaman pohon di TMII. TMII juga berhasil memperoleh pengakuan internasional, *Pacific Asian Travel Association* memberikan Golden Award kepada TMII pada tahun 1987 atas keberhasilan TMII dalam membina industri kecil.<sup>14</sup> TMII juga menjadi destinasi kunjungan peserta KTT Asia Afrika pada era Yudhoyono.

Di samping itu, pada era Orde Baru Indonesia juga melakukan kerja sama dengan sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura dalam bidang budaya dan seni melalui acara televisi Titian Muhibah dan Senada Seirama

pada tahun 1980-an yang menampilkan acara kesenian Melayu. Dengan negara Timur Tengah lebih banyak pendidikan dan agama, seperti kerja sama terkait dengan haji dengan Arab Saudi, serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Indonesia di Mesir, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Iran.<sup>15</sup>

### **Diplomasi Kebudayaan Indonesia: Pascareformasi Hingga Kini**

Sesudah reformasi, tepatnya pada era pemerintahan Habibie, Wahid, serta Megawati Indonesia lebih banyak fokus kepada restrukturisasi pemerintahan pascareformasi, serta kerja sama terkait dengan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kondisi domestik di Indonesia yang belum stabil, serta tantangan dalam politik luar negeri serta diplomasi yang lebih banyak bertumpu pada isu *high politic*, seperti isu separatisme, FDI, serta terorisme.

Pada era Abdurrahman Wahid, Indonesia berupaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, termasuk isu membangun hubungan diplomatik dengan Israel yang kemudian menuai sejumlah pro dan kontra. Upaya untuk membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok diawali dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden Soeharto Nomor 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-Istiadat China. Wahid juga mengubah kata China menjadi Tiongkok, serta menempatkan kepercayaan Kong Hu Chu sebagai salah satu agama resmi yang diakui di Indonesia. Hal tersebut kemudian memberikan implikasi positif terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, hingga muncul wacana pembentukan Poros Indonesia-Tiongkok-India sebagai jalur perdagangan alternatif dalam melawan dominasi kapitalisme Barat.

Diplomasi kebudayaan masa kini juga identik dengan peran publik yang semakin meningkat sebagai aktor baru dalam diplomasi. Pada tahun 2003, tepatnya pada era Megawati, wayang Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai salah satu *masterpiece* kebudayaan dunia, walaupun piagam penghargaan baru diserahkan pada tahun 2005. Dari 130 negara yang mengikuti pemilihan *The Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*, setidaknya terdapat 28 negara yang berhasil lolos, dan Indonesia menempati posisi tertinggi. Ki Manteb Sudarsono menjadi representasi Indonesia untuk menampilkan wayang Indonesia pada ajang penghargaan UNESCO.

Indonesia semenjak tahun 2003 juga telah meluncurkan “*Young Indonesia Ambassador*” atau “Duta Belia” yang kini telah mencapai 582 orang yang tersebar di seluruh tanah air. Pembentukan Duta Belia bertujuan untuk

mengenalkan kebijakan luar negeri Indonesia di daerah, serta bertukar pikiran dengan sesama Duta Belia di ASEAN.<sup>16</sup>

Pada periode pertama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia 2004-2014, Indonesia menampakkan diri sebagai negara yang berperan aktif, bahkan menjadi inisiator dan *host* dalam sejumlah forum internasional. Di antaranya dengan mengadakan *Lake Toba Summit* pada Maret 2005 di Sumatera Utara yang kemudian menghasilkan deklarasi *Lake Toba Call* yang mengajak kepada dunia untuk peduli terhadap permasalahan pasca bencana tsunami, mengingat tsunami Aceh yang menimpa Indonesia, serta sejumlah negara tetangga di awal terpilihnya Yudhoyono yang kemudian menimbulkan reaksi kemanusiaan dan perhatian internasional luar biasa. Deklarasi tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan pemerintah daerah, serta sektor pariwisata Indonesia.<sup>17</sup>

Antara tahun 2004 hingga tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah dalam sejumlah event dialog internasional, seperti Dialog Lintas Agama yang bertujuan untuk mengubah *stereotype* negatif mengenai Islam. Dialog tersebut telah dilaksanakan di Yogyakarta, Vatican, Bali, Den Haag, Cebu, dan Waitangi. Indonesia juga menyelenggarakan *Bali Democracy Forum I* pada tahun 2008, yang diikuti sejumlah 28 negara. Penyelenggaraan BDF bertujuan untuk membahas, *sharing*, serta menghasilkan gagasan terkait dengan masalah demokrasi di negara-negara Asia Pasifik.<sup>18</sup>

Dalam bidang alam serta pariwisata, Pulau Komodo di Indonesia terpilih sebagai salah satu dari New 7 Wonders of Nature yang dilaksanakan sejak 2007 hingga 2011. Berbasis di Swiss, New 7 Wonders merupakan gderakan yang mempromosikan serta melakukan *polling* terkait tujuh keajaiban dunia. Diplomasi kebudayaan melalui sektor pariwisata juga diawali dengan pembentukan *Wonderful Indonesia* pada tahun 2011 yang bertujuan untuk memperkenalkan sejumlah wisata strategis Indonesia kepada dunia.

Pada periode kedua kepemimpinan Yudhoyono, politik luar negeri Indonesia dikenal dengan slogannya "*millions of friends and zero enemy*". Slogan tersebut boleh jadi merupakan bentuk lain dari sebuah "politik bebas aktif", atau "mendayung di antara dua karang". Indonesia semakin aktif dalam mengadakan sejumlah forum internasional seperti, *Bali Democracy Forum II* dan *World Culture Forum* pada tahun 2013, *Asean Community*, dan sejumlah event internasional lainnya. *Bali Democracy Forum* (BDF) diadakan untuk membahas isu-isu demokratisasi, terutama yang terjadi di Dunia Islam, seperti konflik antara Israel dengan Palestina. Dalam BDF, Yudhoyono mengajak kepada negara-negara untuk saling berbagi mengenai pengalaman

terkait demokratisasi di Dunia Islam. Serta inisiasi pembentukan Protokol Anti-Penistaan Agama.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam World Cultural Forum yang bertemakan *'The Power of Culture in Sustainable Development'*, telah menekankan bahwa kebudayaan memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian, pelaksanaan kedua forum tersebut, serta inisiasi Protokol Anti-Penistaan agama tentunya tidak terlepas dari kritikan, tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan acara, namun juga kondisi domestik Indonesia yang belum dianggap belum konsisten dalam menjalankan demokrasi, lantaran pembatasan terhadap sejumlah kelompok atau sekte agama minoritas.

Berbeda dengan Yudhoyono yang banyak menggunakan pendekatan normatif dan multilateral, dengan banyak berperan aktif dalam event internasional, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia cenderung menggunakan strategi gaya diplomasi yang membumi, atau *down to earth*.<sup>20</sup> Beberapa fokus dalam politik luar negeri Jokowi di antaranya adalah memperluas diplomasi yang berbasis *middle power*, peningkatan infrastruktur diplomasi dalam Kementerian Luar Negeri, peningkatan *public diplomacy* serta keterlibatan masyarakat umum dalam hubungan luar negeri. Isu kemaritiman juga menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia pada era Jokowi.<sup>21</sup>

Diplomasi kebudayaan juga menjadi salah satu agenda dalam politik luar negeri era Jokowi. Sejauh ini Indonesia belum berhasil dalam *branding* dan bersaing dengan negara-negara lain. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam implementasi diplomasi digital. Diplomasi digital menjadi fitur penting dalam praktek diplomasi masa kini. Di antaranya dengan video pariwisata *Wonderful Indonesia* dalam event *The Journey of a Wonderful World*. Indonesia berhasil mendapatkan dua gelar juara dunia di kompetisi video pariwisata dunia yang digelar UNWTO atau lembaga PBB yang bergerak di bidang pariwisata. Video *Wonderful Indonesia* menampilkan sejumlah tujuan wisata populer di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bali, Raja Ampat, Nusa Tenggara Barat, dan Wakatobi. Video *Wonderful Indonesia* juga menampilkan kebudayaan khas Indonesia seperti batik dan tarian khas Bali.<sup>22</sup>

Angkasa Pura II menayangkan video *Wonderful Indonesia* ditayangkan di Munich, Jerman dalam *SMART Airport Conference* yang digelar pada tanggal 9-12 Oktober 2017. *SMART Airports* adalah konferensi untuk bandara Eropa yang terdiri dari pameran utama industri bandara untuk peralatan, teknologi, desain, dan layanan tingkat dunia.<sup>23</sup> Indonesia juga akan terlibat dalam Festival Europolia, Festival Kesenian dan Kebudayaan terbesar di Eropa yang diadakan sejak Oktober 2017, hingga Januari 2018. Dalam event



eksibisi seperti ini, Indonesia seringkali mendapatkan lokasi yang kurang strategis, sehingga belum dapat terkonsolidasi dengan baik. Sehingga kurang menarik minat pengunjung dari negara lain.<sup>24</sup>

Selama empat puluh tujuh tahun, pada era Jokowi dan Raja Salman dari Arab Saudi untuk kedua kalinya melakukan kunjungan ke Indonesia, karena kunjungan pertama dilaksanakan oleh Raja Faisal pada tahun 1970-an; era Kepemimpinan Soeharto. Padahal Indonesia sejauh ini memiliki sejumlah kepentingan terkait dengan Saudi, begitu pula sebaliknya. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang besar, tentunya juga memiliki jama'ah haji terbanyak. Arab Saudi juga merupakan negara yang menjadi destinasi penempatan TKI terbesar kedua setelah Malaysia. Pada tahun ini, Indonesia kembali menjalin hubungan dengan Timur Tengah, setelah selama bertahun-tahun mengalami stagnansi.

Kunjungan Raja Salman memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia, di antaranya adalah peningkatan kuota haji pada musim haji tahun 2017; dari 211.000 jemaah menjadi 221.000.<sup>25</sup> Peningkatan kerja sama di bidang pendidikan juga dapat dilihat dengan peningkatan beasiswa pendidikan bagi pelajar Indonesia. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi pelajar Indonesia yang selama ini lebih banyak untuk studi di bidang agama meningkat dengan adanya 250 beasiswa untuk program magister dan doktoral untuk bidang non-agama, dan masih terdapat potensi peningkatan hingga 1000 beasiswa.<sup>26</sup>

Ini menjadi awal yang baik bagi politik luar negeri Indonesia yang semestinya sudah menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai salah satu prioritas dan mitra yang strategis. Dengan itu, Presiden Jokowi dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara Indonesia di hadapan negara-negara Arab yang selama ini lebih sering memandang Indonesia sebagai negara 'pengirim' TKI.<sup>27</sup> Di sini pulalah diplomasi kebudayaan mempunyai ruang untuk berperan aktif memperkenalkan Indonesia bukan sebagai negara 'pengirim' TKI.

Maka dari itu, kunjungan Raja Salman ke Indonesia, awal Maret 2017, menjadi momentum yang kemudian dimanfaatkan oleh Kementerian Pariwisata untuk melaksanakan *Sales Mission* di Dubai dan Abu Dhabi. Menurut Deputy Pariwisata Kementerian Luar Negeri, sejumlah investor dari Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab menunjukkan ketertarikan terhadap Bali setelah kunjungan Raja Salman untuk berlibur di Bali. Walaupun jumlah wisatawan asing dari Uni Emirat Arab lebih rendah dibandingkan dengan Arab Saudi dan Oman, namun Uni Emirat Arab bisa menjadi pasar yang baik karena tingginya ekspatriat, serta masyarakat global yang menjadikan Dubai sebagai tempat untuk transit. Dalam kegiatan

tersebut, setidaknya terdapat 5883 kesepakatan dan lebih dari 34 triliun rupiah.<sup>28</sup>

Meskipun saat ini Indonesia semakin menunjukkan kemajuan dalam diplomasi kebudayaan melalui pariwisata dan kesenian, namun dalam bidang kompetisi terutama olahraga Indonesia masih belum unggul di tingkat internasional. Indonesia sejak tahun 1977 aktif terlibat dalam acara SEA Games, atau South East Asia Games, dan menjadi juara umum pada tahun 1979, 1981, dan 1983. Namun, pascareformasi prestasi Indonesia di bidang olahraga tidak pernah mengalami peningkatan, bahkan semakin terpuruk pada era pemerintahan Jokowi. Pada SEA Games tahun 2015 dan 2017, Indonesia menempati posisi terbawah di antara negara-negara di ASEAN.<sup>29</sup>

## Kesimpulan

Diplomasi kebudayaan sejatinya telah lama menjadi strategi dalam politik luar negeri Indonesia, baik sejak era Orde Lama, Orde Baru, bahkan pascareformasi hingga saat ini. Baik diplomasi kebudayaan Orde Lama, Orde Baru maupun pascareformasi masih bertumpu kepada kepentingan pembangunan nasional, melalui sejumlah aktivitas seperti forum internasional, pameran, dan kompetisi. Perbedaan yang mencolok antara diplomasi era Orde Baru dengan era pascareformasi, adalah praktik diplomasi kebudayaan pada era Orde Baru lebih banyak melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, sedangkan diplomasi sesudah era reformasi mulai memberikan keleluasaan bagi aktor-aktor di luar negara dan *sub-state*, baik yang mewakili kepentingan pemerintah, maupun secara independen.

Hal itu juga terkait dengan berkembangnya aktor-aktor dalam hubungan internasional seiring dengan berkembangnya kajian dan isu dalam HI. Hal inilah yang disebut dengan diplomasi public (*public diplomacy*); diplomasi yang dapat diperankan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya oleh state (negara). Pascareformasi, Indonesia juga semakin aktif dalam pengadaan sejumlah forum internasional, serta implementasi diplomasi digital.

Diplomasi kebudayaan Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Indonesia boleh jadi berhasil dalam mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan nasional yang sifatnya *short term*; sejumlah *goals* yang terkait dengan ekonomi; peningkatan *income* dalam bidang pariwisata dan investasi asing, serta pengenalan budaya Indonesia di mata internasional. Indonesia juga memiliki keunggulan dalam bidang pariwisata, meskipun terdapat sejumlah permasalahan nasional dalam pengelolaan pariwisata; infrastruktur, korupsi, dan sebagainya.

Walaupun demikian, internasionalisasi budaya Indonesia hanya sampai kepada tahap pengenalan, Indonesia belum mampu menjadikan warisan budaya Indonesia sebagai instrumen *spread of influence* sehingga budaya Indonesia dapat menjadi konsumsi global, seperti yang dilakukan oleh Barat, dan sejumlah negara di Asia Timur.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme" dalam buku *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor Isu dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> S. Mark, "A Greater Role for Cultural Diplomacy," *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'*. ISSN: 1569-2981, April (2009).

<sup>4</sup> Appel et al., "Cultural Diplomacy: An Important but Neglected Tool in Promoting Israel's Public Image," The Interdisciplinary Center Herzliya Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy. Diakses tanggal 15 November 2016, [http://portal.idc.ac.il/sitecollectiondocuments/cultural\\_diplomacy.pdf](http://portal.idc.ac.il/sitecollectiondocuments/cultural_diplomacy.pdf)

<sup>5</sup> Hasan Saliu, "The New Nature Of Cultural Diplomacy In The Age Of Online Communication," *Journal of Media Critiques [JMC]* (2017).

<sup>6</sup> D. Sidarta, "Bung Karno dan Diplomasi Budaya," Diakses 23 November 2017, <http://koransulindo.com/bung-karno-dan-diplomasi-budaya/>

<sup>7</sup> E. T. Pauker, "Ganefo 1: Sports and Politics in Djakarta," <http://www.jstor.org/stable/pdf/2642364.pdf>

<sup>8</sup> (Roy, 1995).

<sup>9</sup> B. White, "Diplomacy," dalam *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2005)

<sup>10</sup> S. Murden, "Culture in World Affairs," dalam *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2005).

<sup>11</sup> T Warsito dan W. Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007).

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> R. Sukma, *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity* (London: Routledge Curzon, 2003).

<sup>16</sup> I. Rachmawati, *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni dalam Hubungan Antar-Negara* (Yogyakarta: Calpulis, 2016).

<sup>17</sup> Warsito, *op. cit.*

<sup>18</sup> Rachmawati, *op. cit.*

<sup>19</sup> E. Aspinall dan D. Tomsa, *The Yudboyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* (Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 2015).

<sup>20</sup> P. Chacko et. al, *New Regional Geopolitics in the Indo-Pacific: Drivers, Dynamics and Consequences* (New York: Routledge).

<sup>21</sup> C. Roberts dan L. Sebastian, *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order*. (New York: Springer, 2015).

<sup>22</sup> The Jakarta Post, "Wonderful Indonesia takes part in UNWTO Award-Tourism Video Competition," Diakses pada 22 November 2017, <http://www.thejakartapost.com/travel/2017/08/29/wonderful-indonesia-takes-part-in-unwto-award-tourism-video-competition.html>

<sup>23</sup> R. Aprilia, "Video Wonderful Indonesia Sukses Hipnotis SMART Airports," Diakses pada 22 November 2017, from <http://www.viva.co.id/berita/nasional/966016-video-wonderful-indonesia-sukses-hipnotis-smart-airports>

<sup>24</sup> A. K. Fanani, "Indonesia to Promote Cultural Diplomacy at Europolia Festival," Diakses pada 22 November 2017, <https://en.tempo.co/read/news/2017/07/12/199890714/Indonesia-to-Promote-Cultural-Diplomacy-at-Europolia-Festival>

<sup>25</sup> Dewan Perwakilan Republik Indonesia, "Kunjungan Raja Salman Babak Baru Hubungan RI - Arab Saudi," *Buletin Parlemenaria* (2017), 2.

<sup>26</sup> (Sulistiyono, Djafar, Febriana, & Putra, 2017). B. Sulistiyono et al. "Laporan Khusus: Aksi Nyata Kerjasama," Diakses pada 14 Februari 2018, <http://arsip.gatra.com/2017-03-06/majalah/artikel.php?pil=23&id=163990>

<sup>27</sup> Ahmad Sahide, *Gejolak Politik Timur Tengah: Dinamika, Konflik, dan Harapan* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017).

<sup>28</sup> The Jakarta Post, *op. cit.*

<sup>29</sup> H. Affan, H. "SEA Games 2017: Mengapa sejak reformasi, prestasi Indonesia terus terpuruk?," Diakses pada 23 November 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/olahraga-41072624>

## Daftar Referensi

### Buku dan Jurnal

Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies, 2015.

Chacko, P., Doyle, T., Horimoto, T., Jain, P., Medcalf, R., Nieuwenhuwus, M., ... Willis, D. *New Regional Geopolitics in the Indo-Pacific: Drivers, Dynamics and Consequences*. (P. Chacko, Ed.). New York: Routledge, 2016.

Dewan Perwakilan Republik Indonesia, "Kunjungan Raja Salman Babak Baru Hubungan RI - Arab Saudi," *Buletin Parlemenaria* (2017), 2.

Hadiwinata, Bob Sugeng. *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*. Dalam buku

- Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mark, S. "A Greater Role for Cultural Diplomacy," *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'*. ISSN: 1569-2981, April (2009).
- S. Murden, "Culture in World Affairs," dalam *The Globalization of World Politics* New York: Oxford University Press, 2005.
- Rachmawati, I. *Diplomasi Publik: Meretas Jalan Bagi Harmoni dalam Hubungan Antar-Negara*. Yogyakarta, Indonesia: Calpulis, 2016.
- Roy, S., Harwanto & Mirsawati, Eds. *Diplomasi*, Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Roberts, C., Habir, A., & Sebastian, L. *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order*. New York: Springer, 2015.
- Sahide, Ahmad. *Gejolak Politik Timur Tengah: Dinamika, Konflik, dan Harapan* Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
- Saliu, Hasan. "The New Nature Of Cultural Diplomacy In The Age Of Online Communication." *Journal of Media Critiques [JMC]* (2017).
- Sukma, R. *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity*. London: Routledge Curzon, 2003.
- Warsito, T., & Kartikasari, W. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.
- White, B. "Diplomacy," dalam *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2005)

## Daring

- Appel, A. Irony, A., Schmerz, S., Ziv, A. "Cultural Diplomacy: An Important but Neglected Tool in Promoting Israel's Public Image." The Interdisciplinary Center Herzliya Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy. May. Diakses 15 November 2016,  
[http://portal.idc.ac.il/sitecollectiondocuments/cultural\\_diplomacy.pdf](http://portal.idc.ac.il/sitecollectiondocuments/cultural_diplomacy.pdf)
- Affan, H. "SEA Games 2017: Mengapa sejak reformasi, prestasi Indonesia terus terpuruk?" Diakses 23 November 2017,  
<http://www.bbc.com/indonesia/olahraga-41072624>
- Aprilia, R. "Video Wonderful Indonesia Sukses Hipnotis SMART Airports." Diakses pada 22 November 2017,

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/966016-video-wonderful-indonesia-sukses-hipnotis-smart-airports>

- Fanani, A. K. "Indonesia to Promote Cultural Diplomacy at Europolia Festival." Diakses 22 November 2017, <https://en.tempo.co/read/news/2017/07/12/199890714/Indonesia-to-Promote-Cultural-Diplomacy-at-Europolia-Festival>
- Pauker, E. T., "Ganefo 1: Sports and Politics in Djakarta," <http://www.jstor.org/stable/pdf/2642364.pdf>
- Sidarta, D. "Bung Karno dan Diplomasi Budaya." Diakses pada 23 November 2017, from <http://koransulindo.com/bung-karno-dan-diplomasi-budaya/>
- Sulistiyo, B., Djafar, A., Febriana, B., & Putra, J. A. "Laporan Khusus: Aksi Nyata Kerjasama." Diakses pada 14 Ferbuari 2018, <http://arsip.gatra.com/2017-03-06/majalah/artikel.php?pil=23&id=163990>
- The Jakarta Post. "Wonderful Indonesia takes part in UNWTO Award-Tourism Video Competition." Diakses pada 22 November 2017, from <http://www.thejakartapost.com/travel/2017/08/29/wonderful-indonesia-takes-part-in-unwto-award-tourism-video-competition.html>